

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara *super power* yang mempunyai pengaruh dalam sejarah dan dinamika di wilayah Timur Tengah, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Berbagai usaha dilakukan Amerika Serikat, seperti bekerjasama dengan beberapa negara atau pasukan militer di wilayah Timur Tengah untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang telah dibuatnya. Salah satunya ialah penerapan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam menginvasi Irak pada tahun 2003. Dalam melakukan aksinya tersebut, Amerika Serikat bekerjasama dengan pasukan Kurdi di Suriah untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein.<sup>1</sup> Di tahun 2014, Presiden Barack Obama juga menjalin kerjasama dengan pasukan Kurdi untuk melawan kelompok militan ISIS di Suriah.<sup>2</sup>

Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan luar negerinya yakni “*War On Terrorism*”, mempunyai tujuan untuk memberantas kelompok–kelompok yang dianggapnya menjadi kelompok teroris, salah satunya ialah ISIS. Adanya kerjasama antara Amerika Serikat dengan pasukan Kurdi di Suriah merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat dapat membendung pengaruh ISIS di Suriah. Oleh sebab itu, Amerika Serikat

---

<sup>1</sup> BBC. (2011). “*Timeline: Iraqi Kurds*”. [Daring] [http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle\\_east/country\\_profiles/2893067.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/2893067.stm). Diakses pada 5 November 2019.

<sup>2</sup> CNN. US Military. (2015). “*Syria: Obama authorizes boots on ground to fight ISIS*”. [Daring] <https://edition.cnn.com/2015/10/30/politics/syria-troops-special-operations-forces/index.html>. Diakses pada 5 November 2019.

memberikan bantuan militer kepada pasukan Kurdi di Suriah untuk memperkuat usahanya dalam membendung pengaruh ISIS. Bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada pasukan Kurdi diantaranya ialah pengiriman pasukan dari Amerika Serikat ke Kurdi, memasok senjata api dan juga melatih semua pasukan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah atau *Yekineyen Parastina Gel* (YPG). Dalam *Associated Press* dijelaskan bahwa Amerika Serikat dengan bantuan pasukan Kurdi telah melakukan penyerangan sebanyak 17 ribu kali yang ditujukan diberbagai lokasi di Suriah. Serangan terakhir menyebabkan ISIS jatuh dan beberapa pasukan ISIS yang selamat dari pertempuran tersebut di penjarakan oleh Kurdi.<sup>3</sup>

Kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dengan suku Kurdi di Suriah yang sejak lama terjalin tidak selamanya mengalami dinamika yang baik. Hal ini dibuktikan hubungan Amerika Serikat dengan Kurdi sempat mengalami kerenggangan di tahun 2017. Pada saat itu, Kurdi ingin memerdekakan diri dari Suriah melalui referendurnya pada September 2017. Namun hal ini tidak mendapat dukungan dari Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat sebagai sekutu Kurdi. Amerika Serikat justru bersikap netral terhadap referendum dari Kurdi. Kondisi ini diperparah pada tahun 2018 dibawah pemerintahan Donald Trump. Trump mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk memulangkan pasukannya dari Kurdi. Kebijakan luar negeri tersebut di tulis oleh Trump dalam sebuah akun Twitternya pada 19 Desember 2018, yang berbunyi *"I held off this fight for almost 3 years, but it*

---

<sup>3</sup> CNN. 2019. "Pasukan AS-Kurdi Siapkan Serangan Pamungkas Untuk ISIS". [Daring] <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190211143417-120-368207/pasukan-as-kurdi-siapkan-serangan-pamungkas-untuk-isis>. Diakses pada 5 November 2019.

*is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home, WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to figure the situation out.”<sup>4</sup>*

Kebijakan yang dicetuskan oleh Donald Trump melalui akun twitternya tersebut sempat terhenti dalam penerannya ketika penasihat pertahanan nasional Amerika Serikat, yakni John Bolton, mengungkapkan pada 6 Januari 2019 bahwa tentara AS tidak akan meninggalkan Suriah sampai para militan ISIS telah dikalahkan. Bolton juga menjamin keamanan semua pasukan Kurdi yang bertugas. Selang 5 hari setelah pernyataan dari John Bolton, keadaan justru berbanding terbalik dari apa yang telah dikatakan oleh Bolton. Kementerian pertahanan Amerika Serikat justru menarik kargo militer dari Suriah. Keadaan ini menunjukkan akan adanya penarikan elemen militer lainnya secara bertahap dari Suriah. Pada 6 Oktober 2019, Trump mempertegas kebijakannya tersebut dengan menarik 1000 pasukan Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi pasukan Kurdi. Pasukan Demokratik Suriah atau *Syrian Democratic Force* (SDF) yang dipimpin oleh suku Kurdi mengatakan bahwa suku Kurdi di Suriah merasa dikhianati oleh Amerika

---

<sup>4</sup> BBC. (2019). “*Turkey-Syria border: Kurds bitter as US troops withdraw*”. [Daring] <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49960973>. Diakses pada 5 November 2019.

Serikat sebagai sekutunya yang telah sejak lama bekerjasama untuk memerangi kelompok militan ISIS.<sup>5</sup>

Kebijakan Amerika Serikat menarik pasukannya dari Kurdi di Suriah mengakibatkan ancaman bagi stabilitas keamanan Suriah. Turki yang selama ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kurdi karena Kurdi bersekutu dengan Amerika Serikat, kini Turki dapat melakukan serangannya terhadap pasukan Kurdi. Pada bulan Januari 2019, Trump sempat mengancam akan merusak ekonomi Turki jika Turki melakukan serangan terhadap Kurdi. Namun pada bulan Oktober 2019, Amerika Serikat justru mengatakan di Gedung Putih bahwa angkatan bersenjata Amerika Serikat tidak akan ikut campur dalam serangan Turki ke Suriah. Amerika juga menegaskan bahwa pasukannya tidak akan berada di dekat lokasi serangan yang dilancarkan oleh Turki. Hal ini membuat Turki memiliki kesempatan penuh untuk menyerang pasukan Kurdi di Suriah.<sup>6</sup> Serangan yang dilakukan oleh Turki kepada suku Kurdi ialah bertujuan untuk mendirikan 'zona aman' yang bebas dari milisi Kurdi dan mendirikan tempat tinggal bagi pengungsi Suriah.<sup>7</sup>

Alasan mengapa Turki ingin menyerang Kurdi di Suriah selain ingin mendirikan 'zona aman' di Ras al-Ain dan Tal Abyad, yakni dikarenakan Turki menganggap milisi Kurdi yang tergabung dalam Pasukan Demokratik Suriah (SDF)

---

<sup>5</sup> CNN. (2019). "Pasang Surut Hubungan Militer AS dan Kurdi Suriah". [Daring] <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191012103739-134-438912/pasang-surut-hubungan-militer-as-dan-kurdi-suriah>. Diakses pada 5 November 2019.

<sup>6</sup> BBC. (2019). "Suriah: AS restui operasi militer Turki terhadap milisi Kurdi, Trump dituduh 'berkhianat'". [Daring] <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49956023>. Diakses pada 6 November 2019.

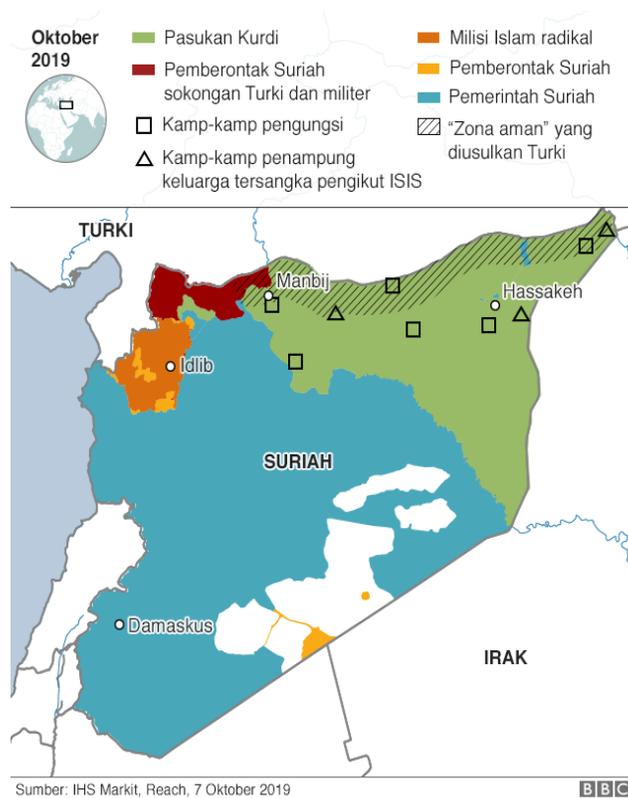
<sup>7</sup> BBC. (2019). "Turki: Serangan ke Suriah menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi". [Daring] <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50009691>. Diakses pada 3 Februari 2020.

sebagai "teroris" yang mendukung pemberontakan anti-Turki. Oleh sebab itu Turki melancarkan operasi militernya pada Rabu, 9 Oktober 2019.<sup>8</sup> *Syrian Observatory* mengatakan bahwa akibat serangan yang dilancarkan Turki mengakibatkan sedikitnya 29 anggota SDF telah tewas dan 17 orang pemberontak Suriah juga dinyatakan tewas. Pada 13 Oktober 2019, Erdogan sebagai Presiden Turki menjelaskan bahwa pasukannya telah menguasai wilayah seluas 109 kilometer persegi, yang mencakup 21 desa. Berikut adalah peta yang menggambarkan wilayah Suriah.

---

<sup>8</sup> CNN. (2019). "Turki Mulai Luncurkan Serangan ke Suriah, Warga Sipil Panik". [Daring] <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191010072828-120-438261/turki-mulai-luncurkan-serangan-ke-suriah-warga-sipil-panik>. Diakses pada 6 November 2019.

**Gambar 1.1** Peta Wilayah Suriah



Sumber: BBC. 2019. "Operasi militer: Didukung Rusia, pasukan Suriah 'memasuki Manbij' yang jadi tujuan serangan Turki". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50051215>.

Dalam menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Turki, Pasukan Demokratik Suriah atau *Syrian Democratic Forces* (SDF) membuat kesepakatan dengan Suriah. Isi kesepakatan tersebut ialah warga Suriah akan mengerahkan pasukan Suriah di

sepanjang wilayah perbatasan yang dikuasai oleh pasukan Kurdi guna untuk menahan dan mengusir agresi Turki.<sup>9</sup>

Keputusan Trump menarik mundur pasukan Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah bukan hanya menguntungkan pihak Turki, namun juga menguntungkan Rusia. Kerjasama Amerika Serikat dengan Kurdi dahulu juga bertujuan untuk membendung pengaruh Rusia di Suriah. Namun setelah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat menarik pasukan dan tidak ikut campur dalam agresi militer yang dilakukan Turki, Rusia justru mendapat peluang untuk menyebarkan pengaruhnya di Suriah.<sup>10</sup> Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan keamanan kepada Suriah melalui pengiriman pasukan Rusia untuk menjaga wilayah perbatasan Turki- Kurdi. Peran Rusia dalam hal bantuan keamanan tersebut membuat pengaruhnya di Timur Tengah semakin besar.<sup>11</sup>

Operasi militer yang di lancarkan oleh Turki membawa dampak positif bagi kelompok ISIS yang telah dipenjarakan oleh Kurdi. Kurdi yang masih kekurangan pasukan setelah penarikan pasukan oleh Amerika Serikat menjadikan Kurdi akhirnya membebaskan tawanan ISIS untuk dijadikan pasukan tambahan dalam membendung serangan dari Turki. Beberapa tawanan ISIS yang dibebaskan oleh Kurdi diantaranya

---

<sup>9</sup> BBC. (2019). “Operasi militer: Didukung Rusia, pasukan Suriah 'memasuki Manbij' yang jadi tujuan serangan Turki”. [Daring] <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50051215>. Diakses pada 6 November 2019.

<sup>10</sup> United States Institute of Peace. (2019). “*A Month After U.S. Withdrawal, What is the State of Play in Syria?*”. [Daring] <https://www.usip.org/publications/2019/11/month-after-us-withdrawal-what-state-play-syria>. Diakses pada 3 Februari 2020.

<sup>11</sup> CNN. (2019). “AS Tarik Serdadu dan Jalan Mulus Putin di Suriah”. [Daring] <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191021200234-120-441608/as-tarik-serdadu-dan-jalan-mulus-putin-di-suriyah>. Diakses 6 November 2019.

ada yang menjadi seorang pembunuh. Hal ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi Amerika Serikat, karena memungkinkan adanya kebangkitan ISIS di Suriah. Kebangkitan kelompok ISIS dapat menjadi ancaman keamanan bagi Negara Amerika Serikat itu sendiri.<sup>12</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Mengapa Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah pada tahun 2019?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dinamika hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Pasukan Kurdi yang sejak lama terjalin. Terhitung sejak Kurdi menjadi sekutu Amerika Serikat dalam menggulingkan pemerintahan Saddam Husein pada tahun 2003. Pada tahun 2018, ketika Trump menjabat sebagai Presiden, Trump mengeluarkan Kebijakan Luar Negeri terkait penarikan pasukan Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah, dimana kebijakan ini di terapkan pada tahun 2019. Keadaan ini justru menyebabkan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Kurdi di Suriah tidak berjalan dengan baik. Bahkan keadaan tersebut juga dapat membangkitkan pengaruh ISIS di Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam terkait isu tersebut dan apa yang melatarbelakangi Donald J. Trump untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri tersebut.

---

<sup>12</sup> BBC. (2019). “Penarikan pasukan AS atas perintah Trump mengubah perang Suriah. Siapa saja yang diuntungkan?”. [Daring] <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50054865>. Diakses pada 6 November 2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi S1 Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPNVJT. Serta manfaat dari penelitian ini secara khusus bagi penstudi Hubungan Internasional diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang hal-hal yang melatarbelakangi Presiden Donald Trump dalam merumuskan kebijakan luar negeri terkait penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah tahun 2019, dengan pembahasan yang lebih berkembang dan semakin diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman secara umum bagi masyarakat luas.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Landasan Teori**

#### **1.5.1.1 *Level of Analysis: Group***

Menurut J. David Singer *Level of Analysis (LoA)* atau peringkat analisis adalah suatu metode yang digunakan oleh para *scholars* hubungan internasional dalam meneliti dan menganalisis suatu fenomena atau gejala, agar dapat fokus terhadap riset yang sedang dilakukan. Tujuan dari penggunaan *LoA* sendiri ialah untuk mengupas hal yang tidak bisa dijelaskan oleh teori hubungan internasional. *LoA* atau peringkat analisis biasanya digunakan untuk menganalisis pola kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara. Selain itu peringkat analisis digunakan untuk membahas alasan dibalik terbentuknya kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara. Penting juga dipahami bahwa dalam merumuskan kebijakan luar negeri seringkali hanya mengacu terhadap beberapa kelompok tertentu saja. Oleh sebab itu,

digunakanlah *Level of Analysis Group* untuk mengkaji keterlibatan kelompok-kelompok yang dapat secara langsung terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri. Kelompok ini mencakup beberapa elit politik, kelompok birokrasi, *think-tank* dan beberapa orang yang berwenang merumuskan kebijakan luar negeri.<sup>13</sup>

Menurut Laura Neack, terdapat aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan yang disebut sebagai *ultimate decision unit*. *Ultimate decision unit* ini yang akan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah dari sebuah politik luar negeri suatu negara.<sup>14</sup> Margaret G Hermann dan Charless F. Hermann menjelaskan bahwa *ultimate decision unit* adalah “...(a) the ability to commit or withhold the resources of the government in foreign affairs and (b) the power or authority to prevent other entities within the government from overtly reversing their position without significant costs (costs which these other entities are normally unwilling to pay)”. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa seperangkat otoritas yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan sumberdaya dan memutuskan kebijakan luar negeri yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Artinya keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan final apabila berada pada *ultimate decision unit* ini. Dalam peringkat analisis kelompok terdiri dari

---

<sup>13</sup> J. David Singer. (1961). *The Level-of-Analysis Problem in International Relations*. *World Politics*. 14 (1), 77-92.

<sup>14</sup> Laura Neack. (2008). *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*. Second Edition. United States: Rowman & Littlefield Publishers. INC.

3 *ultimate decision units*, diantaranya ialah *predominant leader*, *single group*, *multiple autonomous actors*.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan *ultimate decision units* bagian *predominant leader* sebagai acuan dalam menganalisa Kebijakan Luar Negeri Donald Trump terkait penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah. Menurut Margaret G. Hermann dan Charles F. Hermann, *Predominant leader* adalah “*a single individual has the power to make the choice and to stifle all opposition and dissent as well as the power to make a decision alone, if necessary*”.<sup>16</sup> Dari pengertian yang dijabarkan oleh Hermann dan Hermann tersebut dapat dipahami bahwa pembuatan kebijakan luar negeri bergantung pada keputusan individu yang mempunyai kekuatan dan pengaruh yang dominan untuk membuat sebuah pilihan dan dapat melumpuhkan oposisi. Bahkan jika diperlukan individu tersebut akan membuat keputusan secara mandiri untuk keberlangsungan negaranya. Dengan kata lain individu yang dimaksud dapat berupa presiden atau pemimpin yang mempunyai otoritas tinggi.

Ketika seorang pemimpin diketahui memiliki peran dan posisi yang dominan bagi pemerintah, maka *elite* politik yang mempunyai sudut pandang berbeda dengan pemimpin dominan tersebut akan cenderung berhenti menyuarakan pandangannya. Hal ini dikarenakan para *elite* yang memiliki pandangan berbeda tersebut memiliki posisi dibawah pemimpin dominan, sehingga alasan untuk para *elite* tersebut tidak menyuarakan pandangan yang berbeda dengan pemimpin, yakni para *elite*

---

<sup>15</sup> Margaret G. Hermann & Charles F. Hermann. (1989). *Who Makes Foreign Policy Decisions and How : An Empirical Inquiry*. *International Studies Quarterly*. 33(4), 361.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 363.

menghormati pemimpinnya atau *elite* takut akan pembalasan politik. Bahkan jika para *elite* pemerintahan diizinkan untuk menyuarakan pandangannya yang berbeda dengan pemimpin untuk membuat suatu kebijakan negara, maka sudut pandang yang diberikan para *elite* tersebut tidak akan relevan dengan hasil politik. Abraham Lincoln mengilustrasikan unit keputusan *predominant leader* dalam sebuah rapat kabinet berupa perbandingan suara 1:11, dan 1 suara tersebut dapat mendominasi terbentuknya keputusan. 1 suara tersebut ialah dimiliki oleh *predominant leader*.<sup>17</sup>

*Ultimate decision units* bagian ini dalam menganalisis proses pembuatan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada karakteristik dan prinsip dari pemimpin dominan yang terlibat didalamnya. Selain itu, *predominant leader* juga berfokus untuk menelaah bagaimana interaksi antara pemimpin dominan dengan kelompok yang terlibat secara langsung dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan luar negeri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 365

<sup>18</sup> Hermann dan Hermann. loc.cit

**Gambar 1.2** *Key Control Variable by Type of Decision Unit*

TABLE 1. Key control variables by type of decision unit.

<i>Unit</i>	<i>Control variable</i>	<i>End points</i>	<i>Status</i>
Predominant Leader	Contextual Sensitivity	(A) Insensitive (B) Sensitive	Self-Contained Externally Influenceable
Single Group	Prompt Consensus	(A) Agreement (B) Disagreement	Self-Contained Externally Influenceable
Multiple Autonomous Actors	Relationship Among Actors	(A) Zero-Sum (B) Non-Zero-Sum	Self-Contained Externally Influenceable

Sumber: Margaret G. Hermann & Charles F. Hermann. 1989. "Who Makes Foreign Policy Decisions and How : An Empirical Inquiry. *International Studies Quarterly*". 33(4), 361. Page. 364.

Dari tabel tersebut Margaret G. Hermann menjelaskan bahwa terdapat beberapa kondisi yang dapat mendukung penggunaan *predominant leader* dalam suatu negara. *Predominant Leader* digunakan ketika variabel kontrolnya menunjukkan *Contextual Sensitivity*. *Contextual Sensitivity* ialah kondisi yang membutuhkan kepekaan dan keputusan dengan cepat dari seorang pemimpin. Hermann memberikan contoh sebagai berikut: ketika seorang Presiden Amerika Serikat dalam konferensi pers memberikan jawaban spontan ketika diberi pertanyaan yang sifatnya mendesak.<sup>19</sup>

Dalam buku lain yang juga merupakan tulisan Hermann yang berjudul "*How Decision Units Shape: Foreign Policy: A Theoretical Framework*", Hermann menjelaskan bahwa penggunaan *Predominant Leader* dapat digunakan dalam sistem pemerintahan presidensial, dimana seorang Presiden yang merupakan pemimpin

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 364

tertinggi di suatu negara diberi wewenang atas pembuatan kebijakan luar negeri. Wewenang tersebut telah disahkan oleh konstitusi atau badan hukum yang mengaturnya. Dari penjelasan Hermann tersebut dapat dipahami bahwa seorang Presiden berwenang untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri dengan atau tanpa persetujuan dari jajaran menteri.<sup>20</sup> Seperti halnya yang dilakukan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ketika mengeluarkan kebijakan luar negeri terkait penarikan pasukan dari Kurdi di Suriah. Trump menggunakan otoritasnya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan tersebut secara mandiri.

Pada gambar 1.1 terdapat dua *end point* yakni A dan B, yang mana *end point* tersebut menunjukkan apakah pembuatan kebijakan luar negeri diambil oleh pemimpin dalam orientasi *insensitive* atau *sensitive*. Proses pembuatan kebijakan luar negeri yang didasarkan oleh *predominant leader* juga bergantung pada 3 status, diantaranya apakah kebijakan itu dibuat berdasarkan *self-contained*, *externally* dan *influenceable*. Status tersebut didasarkan pada *end point*, yakni jika kondisi yang di labeli “A” pada *end points*, maka keputusan yang diambil bergantung pada dinamika internal unit yang berarti keputusan tersebut diambil secara mandiri oleh Presiden. Sedangkan kondisi yang dilabeli “B” pada *end points* menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan luar negeri yang dilakukan Presiden didasarkan pada faktor eksternal dan dipengaruhi oleh jajaran pemerintahan dalam domestiknya. Variabel kontrol dan *end point* dalam gambar 1.1 dapat memudahkan peneliti untuk

---

<sup>20</sup> Margaret G. Hermann. (2001). *How Decision Units Shape Foreign Policy: A Theoretical Framework*. *International Studies Review*, 3(2), 47–81.

mengetahui arah pembuatan kebijakan luar negeri dari suatu negara yang dipengaruhi oleh *behavior* atau tingkah laku dari seorang pemimpin.<sup>21</sup>

Tidak semua pemimpin negara atau Presiden memimpin dengan orientasi yang sama. Hal ini dapat dilihat apakah orientasi pemimpin terhadap urusan luar negeri memaksanya menjadi relatif tidak sensitif atau justru lebih sensitif terhadap informasi dari lingkungan politik. Terdapat beberapa ciri khusus yang dapat menunjukkan apakah seorang pemimpin negara bersifat *insensitive* atau *sensitive* dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Menurut Hermann, pemimpin negara yang *insensitive* mempunyai pandangan yang kuat tentang dunia dan cara kerjanya. Sehingga pemimpin tersebut menggunakan pandangannya terhadap dunia sebagai lensa untuk memilih dan menafsirkan informasi yang diterima. Pemimpin dengan sikap seperti ini hanya akan mencari isyarat yang berupa informasi, data dan saran untuk mengkonfirmasi keyakinannya dalam hal membuat kebijakan luar negeri. Selain itu *insensitive predominant leader* hanya akan memilih penasihat dalam urusan negara yang sejalan dengan pandangannya tersebut. Akibatnya pemimpin dominan menjadi relatif tidak sensitif terhadap pendapat, saran dan data yang berbeda dengan apa yang ingin dilakukan oleh pemimpin dominan. Mengetahui orientasi dan cara pandang dari *insensitive predominant leader*, maka dapat diketahui bagaimana pemimpin tersebut memposisikan dan mengarahkan pemerintahannya, yang mana

---

<sup>21</sup> Margaret G. Hermann & Charless F. Hermann, op.cit. hal 364-365.

akan cenderung diarahkan pada keputusan yang telah dibuat oleh pemimpin tersebut.<sup>22</sup>

Selain Hermann, Gardner juga memiliki pendapat yang sama dalam menjelaskan *insensitive predominant leader*. Menurut Gardner pemimpin yang bersifat *insensitive* memiliki pendapat dan keyakinan sendiri dalam memandang urusan negara, sehingga informasi yang mereka terima akan dipilih dan ditafsirkan melalui lensa yang terstruktur yang didasari oleh keyakinan dan motif mereka. Pemimpin seperti ini memiliki standar pribadi yang akan mendasari segala tindakannya dan mencari dukungan yang sesuai dengan standar pribadinya tersebut.<sup>23</sup> Menurut Alexander L. George, pemimpin yang *insensitive* akan cenderung di dorong oleh karakter dan pandangan mereka sendiri, sehingga pemimpin akan berusaha mengedepankan pandangan dan keyakinan pemimpin dalam kondisi apapun karena pemimpin menganggap bahwa pemimpin tersebut mempunyai peran dan pengaruh yang besar dalam situasi yang sedang terjadi.<sup>24</sup>

Berbeda dengan pemimpin yang *insensitive*, pemimpin yang bersifat *sensitive* memiliki gaya kepemimpinan yang terbuka dan peka terhadap informasi yang masuk. Jenis pemimpin ini akan lebih mengutamakan melihat kondisi lingkungan yang sedang dihadapi, sehingga pemimpin tersebut lebih bersifat pragmatis. Menurut Hermann, *sensitive predominant leader* dalam membuat keputusan, terlebih dahulu

---

<sup>22</sup> Margaret G. Hermann & Charless F. Hermann, op.c it. hal 365-366.

<sup>23</sup> Dan Cadwell and Timothy J. McKeown. (1993). *Diplomacy, Force, And Leadership: Essays In Honor Of Alexander L. George*. New York: Routledge.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

akan memastikan siapa saja yang terlibat dalam kasus yang sedang dihadapi. Selain itu pemimpin juga akan menelaah lebih lanjut terkait informasi yang bertentangan dengan pendapat pemimpin itu sendiri, untuk mempertimbangkan keputusan yang terbaik dimana akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan politiknya. Pada akhirnya dalam membuat keputusan, pemimpin tipe ini akan melihat faktor eksternal (melihat tindakan dari pemerintah lain) dan dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek lain dari sistem politik domestiknya.<sup>25</sup>

Menurut Neack, *sensitive predominant leader* akan menggunakan cara diplomasi dan kerjasama untuk mengatasi problematika yang sedang terjadi di negaranya. Pemimpin tipe ini juga akan mengambil tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip hidupnya agar tindakan dan keputusan yang diambil tetap mengikuti situasi dari lingkungan dari pemimpin.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, dalam membangun citra diri dari seorang pemimpin, pemimpin akan cenderung menyesuaikan harapan orang-orang yang dipimpin.<sup>27</sup>

### **1.5.1.2 Presidential System of United States**

Amerika Serikat merupakan negara republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan terbagi atas beberapa distrik federal. Sistem pemerintahan yang secara konsekuen di anut oleh Amerika Serikat ialah sistem pemerintahan

---

<sup>25</sup> Margaret G. Hermann & Charless F. Hermann, op.cit. hal 366

<sup>26</sup> Laura Neack. (2014). *The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interest*. Third Edition. New York: Rowman & Littlefield Publishers. INC.

<sup>27</sup> Dan Cadwell and Timothy J. McKeown. op.cit.

presidensial yang dilandaskan pada Konstitusi tahun 1787.<sup>28</sup> Konstitusi yang telah menjadi dasar hukum bagi Amerika Serikat telah mengalami beberapa kali amandemen. Prinsip yang dianut dalam sistem presidensial di Amerika Serikat ialah prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang disebut sebagai *trias politica* yang mana terbagi atas 3 cabang utama dalam pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>29</sup> Sistem ini dikenal sebagai sistem “*Check and Balances*” yang mana memberikan batasan-batasan tertentu pada cabang pemerintahan agar tidak turut ikut campur secara berlebihan dalam tindakan cabang kekuasaan lain. Selain itu sistem ini juga menekankan bahwasannya antara cabang kekuasaan satu dengan yang lainnya tidak berhak untuk membubarkan atau memberhentikan tanpa ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diterapkan agar dalam pengambilan keputusan pada negara demokrasi presidensial menjadi lebih efektif dan terstruktur.<sup>30</sup>

Amerika Serikat telah mengatur fungsi tiap cabang pemerintahan yang diatur dan dituangkan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Menurut Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa semua kekuasaan pada lembaga Legislatif dipegang dan dikendalikan oleh Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari Senat dan DPR (*House of Representatives*). Sedangkan pada Pasal 2 ayat 1 kekuasaan eksekutif akan dipegang oleh Presiden Amerika Serikat. Presiden akan memegang jabatannya

---

<sup>28</sup> The White House. “*Our Government: State and Local Government*”. [Daring] <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/our-government/state-local-government/>. Diakses pada 5 April 2021.

<sup>29</sup> Thomas W. Merrill. (1991). *The Constitutional Principle of Separation of Power. The Supreme Court Review, 1991*, 225-260.

<sup>30</sup> Lucian Radu, (2010), *The System of “Checks and Balances” in the Relationship Between the U.S. PRESIDENCY and AMERICAN CONGRESS*, *Bulletin of the Transilvania University of Braşov* • Vol. 3 (52).

bersama Wakil Presiden selama jangka waktu empat tahun. menurut Alexander Hamilton sebagai salah satu penggagas di Amerika Serikat memberikan pernyataan bahwa hak yang dimiliki oleh Presiden bersifat lebih terbatas dan berbeda dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh raja (*royal prerogatives*). Menurut Alexander, Presiden tidak akan memiliki kekuasaan mutlak untuk menolak pengesahan undang-undang, namun Presiden memiliki kewenangan bersama dengan lembaga legislatif dalam membuat perjanjian dengan negara lain, dan memiliki kewenangan yang sama dengan legislatif dalam memilih dan mengangkat pejabat negara sesuai Konstitusi yang berlaku. Pada Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman Amerika Serikat akan dipegang oleh Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

Mekanisme dalam pemerintahan presidensial di Amerika Serikat memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya ialah:

1. Jabatan eksekutif tidak terbagi (*not dividen*) dan hanya dipegang oleh seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk waktu tertentu.<sup>32</sup>
2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, namun dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, Presiden dan kabinetnya tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif dikarenakan Presiden bukan bagian dari lembaga legislatif. Akan tetapi Presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat.

---

<sup>31</sup> National Archives. "The Constitution of the United States: A Transcription". [Daring] <https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript>. Diakses pada 5 April 2021.

<sup>32</sup> Efriza. (2008). Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan. Bandung: Alfabeta. Hal.268

3. Presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan oleh badan legislatif, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat memberhentikan anggota maupun lembaga legislatif.<sup>33</sup>
4. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh kelompok dalam sebuah kabinet, yang mana sekretaris departemen dan anggotanya di pilih secara langsung oleh Presiden. Ini adalah hak yang diberikan kepada Presiden. Kabinet tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dan dapat diberhentikan oleh Presiden apabila dibutuhkan.
5. Presiden dapat memveto tindakan legislatif, dalam hal menolak atau mengesahkan rancangan undang-undang hasil pembahasan lembaga legislatif. Hak ini diberikan kepada Presiden sebagai bentuk *check and balance* antar cabang lembaga pemerintahan.<sup>34</sup>

Sistem pemerintahan presidensial yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat memungkinkan untuk dapat memelihara sistem *check and balance*, hal ini dikarenakan dalam mekanismenya telah terbagi 3 cabang pemerintahan yang memiliki kinerja terpisah dengan fungsi yang berbeda tiap cabang. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kerancuan dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan.<sup>35</sup> Selain itu, Presiden dalam sistem presidensial tidak terlalu dibatasi dalam membuat suatu kebijakan, hal ini dikarenakan setiap cabang pemerintahan memiliki

---

<sup>33</sup> T. Sumbodo. (1988). Hukum Tata Negara. Bandung: PT Eresco. Hal 275.

<sup>34</sup> John M. Carey (2008). *Presidential versus Parliamentary Government. Handbook of New Institutional Economics*. Page 91-122.

<sup>35</sup> Radu, loc.cit.

fungsi dan kinerja pada bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, sistem presidensial memberikan peluang bagi Presiden Amerika Serikat untuk dapat membuat keputusan dengan lebih mandiri. Sistem ini juga mendukung Presiden untuk mengambil keputusan secara lebih cepat jika sebuah negara sedang dihadapkan pada kondisi krisis.<sup>36</sup>

Presiden Amerika Serikat memiliki mekanisme pemerintahan yang lebih stabil dengan ketentuan jabatan yang sudah disahkan dalam Konstitusi. Sehingga dalam hal merumuskan kebijakan Presiden tidak perlu menunggu mendapat dukungan dari para Senator yang tergabung dalam lembaga legislatif. Selain itu, Presiden juga tidak perlu mengkhawatirkan akan kehilangan jabatannya apabila kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan para anggota legislatif. Di samping itu, Presiden juga dapat memilih dan mengangkat anggota dalam kabinetnya yang nantinya akan memimpin setiap departemen. Hal ini tentunya sesuai dengan kriteria yang disesuaikan dengan keinginan dari Presiden yang nantinya juga diharapkan dapat mendukung langkah yang diambil oleh Presiden.<sup>37</sup>

Presiden Amerika Serikat memiliki kewenangan atas pengendalian urusan militer domestiknya. Hal ini seperti yang tercantum dalam konstitusi pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat selain menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden juga menjabat sebagai Panglima tertinggi

---

<sup>36</sup> Carey. loc.cit

<sup>37</sup> *Ibid.*,

Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat,<sup>38</sup> yang mana dengan adanya kewenangan tersebut, Presiden dapat menggunakan kekuatan militer dan mengumpulkan intelijen asing. Dalam mekanismenya, Presiden bertanggungjawab atas pertahanan militer dan kepentingan nasional negara Amerika Serikat, termasuk pengendalian dan pengaturan strategi pasukan militer AS yang dapat digunakan untuk bernegosiasi dengan negara lain jika dibutuhkan. Presiden sebagai kepala pemerintahan juga memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan luar negeri, mengawasi pelaksanaannya dan berupaya mendapatkan sumberdaya yang mana untuk mendukung kebijakan yang telah dibuat. Presiden juga memiliki wewenang untuk menunjuk departemen maupun agensi untuk diberikan peran dalam hal melaksanakan proses penerapan kebijakan luar negeri.<sup>39</sup>

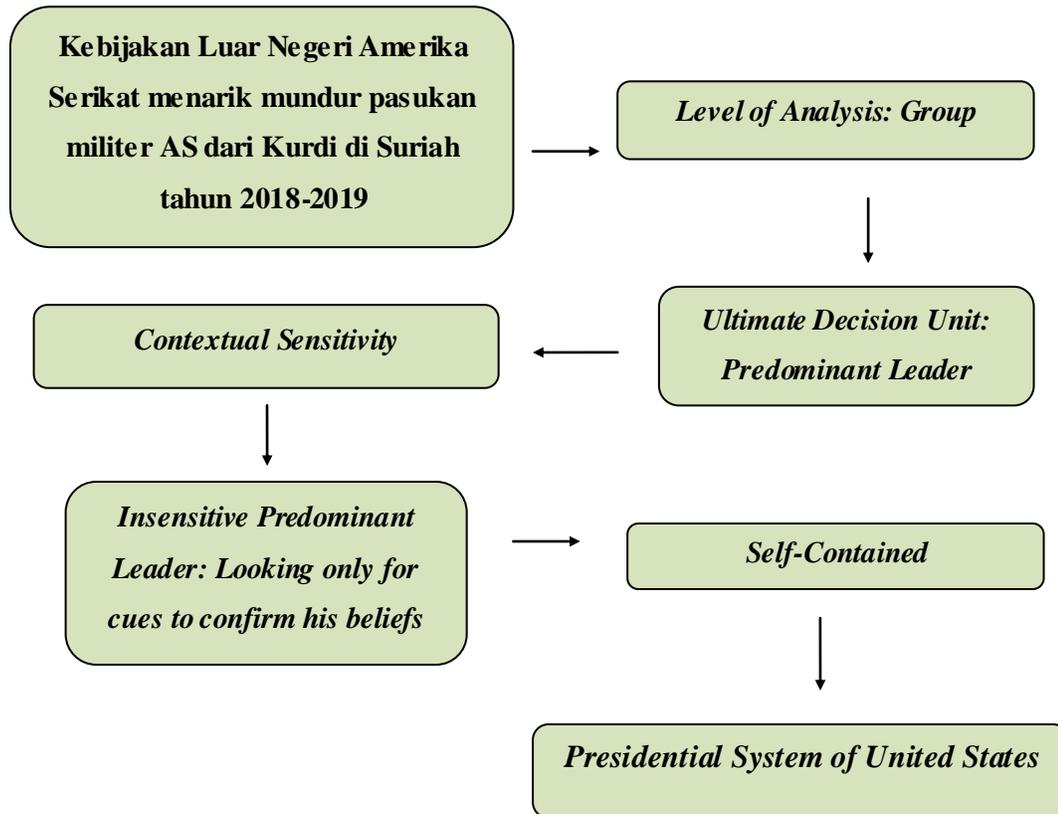
---

<sup>38</sup> National Archives, loc.cit.

<sup>39</sup> Foreign Policy Association. "How U.S. Foreign Policy is Made". [Daring] [https://fpa.org/features/index.cfm?act=feature&announcement\\_id=45&show\\_sidebar=0](https://fpa.org/features/index.cfm?act=feature&announcement_id=45&show_sidebar=0). Diakses pada 11 April 2021.

## 1.6 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.3 Bagan Sintesa Pemikiran



Berdasarkan penjelasan teorisasi pada sub-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik sebuah sintesa pemikiran seperti yang terdapat dalam gambar diatas, yakni Kebijakan Luar Negeri terkait penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah tahun 2019 yang dicetuskan oleh Donald Trump melalui akun twitternya, dapat ditelaah menggunakan *Level of Analysis*. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh J. David Singer bahwa *Level of Analysis* atau peringkat analisis dapat digunakan untuk membahas alasan dibalik terbentuknya kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara. Penelitian ini menggunakan peringkat analisis kelompok

dimana kelompok yang akan dianalisis ialah para elit yang secara langsung terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri.

*Ultimate decision unit* bagian *Predominant Leader* dipilih untuk menganalisis kebijakan Donald Trump terkait penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah. Hal ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Margaret G. Hermann dan Charles F. Hermann bahwa pengambilan kebijakan luar negeri bergantung pada individu yang mempunyai kekuatan dan pengaruh yang dominan untuk melumpuhkan oposisi. Penggunaan *ultimate decision unit* ini bertujuan untuk memfokuskan pada analisis individu atau pemimpin dominan yang terlibat secara langsung dengan proses pengambilan kebijakan luar negeri. Dapat dipahami bahwa keputusan dalam *ultimate decision unit* ini bersifat final apabila individu atau pemimpin yang dominan tersebut telah memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Hermann juga menjelaskan bahwa *predominant leader* digunakan dalam kondisi yang membutuhkan respon dan kepekaan yang cepat dari pemimpin (*Contextual Sensitivity*). Kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Trump terkait penarikan pasukan AS merupakan sebuah respon dari fenomena yang terjadi di Suriah.

Dari penjelasan pada sub-bab sebelumnya terkait sifat dan karakteristik dari seorang pemimpin, Donald Trump memiliki karakteristik yang cenderung mengarah pada *insensitive predominant leader*. Oleh sebab itu dapat ditelaah bahwa Trump memiliki pandangan yang kuat terhadap dunia dan cara kerjanya, sehingga pandangan tersebut dijadikan prinsip untuk memutuskan kebijakan luar negerinya. Hal ini dibuktikan dengan *statement* yang dikemukakan oleh Trump dalam akun twitternya,

bahwa segala sesuatu yang ia lakukan haruslah menguntungkan pihak Amerika Serikat. Dalam pandangan Trump, kebijakan terkait penarikan pasukan dari Kurdi di Suriah merupakan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat, sehingga Trump hanya akan mencari isyarat berupa informasi, saran dan data untuk mengkonfirmasi keyakinannya tersebut. Hermann menjelaskan dalam tabel variabel kontrolnya, bahwa pemimpin *insensitive* akan mengeluarkan kebijakan atau keputusan secara mandiri (*Self-Contained*). Trump dikategorikan sebagai pemimpin yang *insensitive* karena Trump mengeluarkan kebijakan tersebut secara mandiri yang didasarkan pada prinsip dan pandangan pribadinya.

Presiden Trump mengambil kebijakan secara mandiri juga didukung oleh sistem pemerintahan yang secara konsekuen dianut oleh Amerika Serikat, yakni sistem presidensial. Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Amerika Serikat menerapkan sistem presidensial untuk memelihara *check and balances*, dikarenakan dalam menjalankan mekanisme pemerintahan, telah dibagi menjadi 3 cabang lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing. Pada sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat, seorang presiden tidak terlalu dibatasi dalam membuat suatu kebijakan, hal ini dikarenakan setiap cabang pemerintahan memiliki fungsi dan kinerja pada bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, sistem presidensial memberikan peluang bagi Presiden Trump untuk dapat membuat keputusan dengan lebih mandiri. Sistem presidensial di Amerika Serikat juga mendukung Presiden untuk mengambil keputusan secara lebih cepat jika

sebuah negara sedang dihadapkan pada kondisi krisis yang dapat disebut sebagai *Contextual Sensitivity*.

### **1.7 Argumen Utama**

Teori *Predominant Leader* dalam *Level of Analysis Group* yang dikemukakan oleh Margaret G. Hermann dan Charles F Hermann digunakan penulis sebagai dasar untuk menganalisis proses pengambilan kebijakan Donald Trump terkait penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah. Oleh sebab itu, penulis dapat memberikan argumen bahwa dalam merumuskan kebijakan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan kelompok yang berupa para elit politik Trump. Trump sebagai pemimpin dominan yang memiliki karakteristik *insensitive* menjadikan Trump cenderung hanya mendengarkan penasihat nasionalnya yang sejalan dengan pandangan pribadi Trump, serta mencari data untuk mengkonfirmasi keabsahan dari pandangan Trump tersebut.

Senator Rand Paul (*U.S Senator from Republican Party since 2011-now*) memiliki pandangan dan saran yang sejalan dengan pandangan Trump, oleh sebab itu Trump lebih cenderung mempertimbangkan saran dari Rand Paul daripada saran dari para dewan keamanan nasional yang pada saat itu menentang keputusan Trump. Para dewan yang menentang keputusan Trump untuk tidak menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Suriah, diantaranya ialah James Mattis (*U.S Secretary of Defense since 2017 until 2018*), Joseph Dunford (*Chairman of The Joint Chiefs of Staff Commandant of The Marine Corps International Security Assistance Force since 1977 until now*), Mike Pompeo (*Director of CIA 2017-2018 and U.S Secretary*

*of State 2018-now*), John Bolton (*U.S. National Security Advisor since 2018- now*), Lindsey Graham (*U.S. Senator from Republican Party since 2003-now*), dan Mark T. Esper (*U.S. Secretary of The Army 2017-2019 and U.S. Secretary of Defense 2019-now*).

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, bahwa *predominant leader* memiliki suara dominan yang diilustrasikan dalam 1:11 suara. Sehingga meskipun beberapa para elit menentang keputusan Trump, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hasil politik, karena Trump sebagai *predominant leader* memiliki suara yang dominan sehingga dapat memutuskan kebijakan sesuai dengan pandangan pribadinya. Selain itu, dalam sistem presidensial Amerika Serikat, memberikan peluang bagi Presiden Trump untuk dapat mengeluarkan keputusan secara mandiri, hal ini dikarenakan adanya sistem *check and balances* yang menyebabkan Presiden Trump tidak terlalu dibatasi dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian pada dasarnya diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang ingin diketahui oleh penulis. Dalam penelitian yang sedang diteliti penulis yakni tentang “Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat menarik mundur pasukan militer AS dari Kurdi di Suriah tahun 2019” ini termasuk dalam tipe penelitian Eksplanatif. Seperti yang diketahui bahwa tipe penelitian eksplanatif ialah menjelaskan hubungan yang kausal antar variabel yang

dapat mempengaruhi hipotesis yang dihasilkan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, setidaknya ada 2 variabel yang dihubungkan, dan penelitian dilakukan untuk menjelaskan, memprediksi dan menemukan fakta pada gejala yang sedang terjadi. Untuk menghubungkan sebab-akibat tersebut dikenal istilah unit analisis (eksplanan) dan unit eksplanasi (eksplanandum).<sup>41</sup> Dalam hal ini, unit analisis atau variabel dependen adalah Kerjasama antara pasukan militer Amerika Serikat dengan pasukan Kurdi di Suriah sejak tahun 2003. Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen ialah hal-hal yang melatarbelakangi Trump untuk menarik mundur pasukan militer Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah pada tahun 2019.

### 1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat telaah pustaka (*library research*), yakni dengan mengumpulkan data dari buku, tulisan, artikel dan sejumlah literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas secara *offline* maupun *online*. Teknik pengumpulan data melalui media elektronik menggunakan sumber yang dapat dipercaya dan *reliable*. Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data kualitatif, dimana data berupa kata verbal, bukan data statistik.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> J. Ladyman, (2002), “*Understanding Philosophy of Science*”, London: Routledge.

<sup>41</sup> V.J. Mannoia, (1986), *What is Science?; An Introduction to the Structure and Methodology of Science*. Lenham, MD: University Press of America.

<sup>42</sup> Burhan Bungin, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### 1.8.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah analisa kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dibagi dalam 4 cara. Cara yang pertama ialah pengumpulan data, dalam tahap ini penulis mengumpulkan data melalui observasi. Cara yang kedua ialah reduksi data (*data reduction*), adalah suatu cara dimana penulis memilih data yang pokok, memfokuskan pada hal yang paling penting dalam penelitiannya. Sedangkan cara yang ketiga ialah penyajian data (*data display*), dalam tahap ini penulis akan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang dituangkan dalam bagan yang menjelaskan hubungan antar variabel. Cara yang terakhir yakni *conclusion drawing*, langkah terakhir yang dilakukan penulis ialah melakukan penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan yang dihasilkan berupa *main argument* yang dapat menjawab rumusan masalah, serta akan dikembangkan pada bab-bab selanjutnya.<sup>43</sup>

### 1.8.4 Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian menggunakan batasan waktu mulai dari 2018 sampai 2019. Tahun 2018, merupakan tahun dimana Trump mengeluarkan kebijakan luar negerinya terkait penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah yang disampaikan melalui akun twitternya, serta terdapat hal-hal yang melatarbelakangi Trump dalam mengeluarkan kebijakan. Pada tahun 2018 juga terdapat peran dari para elit pemerintah yang mendukung dan

---

<sup>43</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. (1990). *Analisis Data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman: penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 15-19.

menolak keinginan Trump untuk menarik pengaruh dari Suriah, sehingga pendapat para elit tersebut mempengaruhi hasil keputusan yang dipilih oleh Trump. Sedangkan tahun 2019, merupakan tahun yang menjelaskan proses kebijakan tersebut dilaksanakan, yang mana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Trump dalam keputusannya untuk menerapkan kembali kebijakan luar negeri yang sudah dibuatnya sejak tahun 2018. Batasan materi yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada penjelasan apa yang melatarbelakangi Trump dalam merumuskan kebijakan luar negeri, dan bagaimana sikap Trump dalam kegiatan interaksi dengan para elit politiknya, dimana hal tersebut berpengaruh dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan luar negeri. Fenomena tersebut dianalisis menggunakan *Level of Analysis: Group* bagian *Predominant Leader*.

### **1.8.5 Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan, penelitian ini terbagi menjadi empat bab, yaitu Bab I adalah bab pendahuluan, bab ini berisi penjelasan mengenai hal-hal yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terbagi dalam beberapa sub bab. Sub bab tersebut diantaranya ialah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, teorisasi, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dalam penelitian ini mengidentifikasi siapa saja para elit yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Suriah, yang dalam prosesnya berawal dari 29 Maret 2018. Sehingga dalam bab ini penulis akan memaparkan *statement* yang

merupakan penjelasan posisi para elit politik yang pro dan kontra terhadap keinginan Trump yang sebelumnya ingin menarik pengaruh dari Suriah. Selain itu, penulis juga akan memaparkan bagaimana sikap yang cenderung diambil oleh Trump dalam menanggapi informasi, saran dan data yang masuk dari para elit politiknya.

Bab III dalam penelitian ini, penulis akan membahas *statement* pro dan kontra dari para elit politik dalam menanggapi kebijakan luar negeri yang sudah diputuskan oleh Trump pada 19 Desember 2018 terkait penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah yang diumumkan melalui akun twitternya, dimana hal tersebut mempengaruhi proses penerapan kebijakan Trump pada 6 Oktober 2019.

Bab IV adalah pemaparan analisis terkait alasan Trump untuk menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Kurdi di Suriah. Selain itu bab ini juga berisi pemaparan analisis terkait interaksi Trump dengan para elit politiknya dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan luar negeri seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dengan ditelaah menggunakan teori *Level of Analisis Group* bagian *Predominant Leader*.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.